

**ANALISIS KINERJA PT BANK BNI SYARIAH SESUDAH PEMISAHAN  
(SPIN OFF) DARI PT BANK BNI (PERSERO)TBK**

**Achmad Chotib**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*

*Email:achmad\_chotib@yahoo.com*

**ABSTRACT**

Islamic bank has growth well in Indonesia, and improve the economic and social welfare. Strategic decision related to establishment of Islamic Bank is spin off. There are only 2 banks in Indonesia that really spin off: PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) and PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). The purpose of this study was to analyze the performance of BNI Syariah before the spin-off compared with after the spin-off and to analyze the performance of BNI Syariah after the spin-off compared with the performance of BJB Syariah after the spin off. Both of the performance analysis based on CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, and FDR. The study was conducted by using analysis Paired Sample T-Test and Independent Sample T-Test. Based on quarterly financial reporting in year 2008-2012 the result showed that the performance of BNI Syariah before and after the spin-off does not difference significantly. The comparison of BNI Syariah and BJB Syariah after spin off showed that some ratios (NPF, NPM, ROA, ROE) did not difference significantly, but for CAR and FDR, there was a significant difference.

**Keywords:** Sharia Bank, Spin Off, Performance, Financial Ratios.

**ABSTRAK**

Bank syariah memiliki pertumbuhan yang baik di Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Keputusan strategis yang terkait dengan pendirian Bank Islam adalah spin off. Hanya ada 2 bank di Indonesia yang benar-benar berputar: PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dan PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja BNI Syariah sebelum spin-off dibandingkan dengan setelah spin-off dan untuk menganalisis kinerja BNI Syariah setelah spin-off dibandingkan dengan kinerja BJB Syariah setelah spin off. Kedua analisis kinerja berdasarkan CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis Paired Sample T-Test dan Independent Sample T-Test. Berdasarkan laporan keuangan triwulanan tahun 2008-2012 hasilnya menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah sebelum dan sesudah spin-off tidak berbeda secara signifikan. Perbandingan BNI Syariah dan BJB Syariah setelah spin off menunjukkan bahwa beberapa rasio (NPF, NPM, ROA, ROE) tidak berbeda secara signifikan, tetapi untuk CAR dan FDR, ada perbedaan yang signifikan.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Spin Off, Kinerja, Rasio Keuangan.

**PENDAHULUAN**

Bank merupakan sebuah organisasi yang memiliki peranan sangat penting bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan status sosial

masyarakat. Tak dapat dibayangkan, bagaimana suatu negara dapat membangun perekonomian tanpa keterlibatan bank dalam kegiatan ekonomi dan sosialnya. Juga tak dapat dibayangkan, bagaimana pembangunan ekonomi suatu negara dikatakan berhasil tanpa adanya keseimbangan antara ekonomi dan sosial masyarakatnya, dan bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam membantu pencapaian keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan literatur Profil Bank Muamalat, dalam website: <http://www.muamalatbank.com/home/about/profile>, diunduh 31 Maret 2013 bahwa Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (BMI) yang mulai beroperasi 1 Mei 1992. Pendiriannya atas dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim dengan pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Dalam waktu dua tahun setelah didirikan, BMI berhasil menyandang predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisinya sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Krisis moneter tahun 1998 yang memberikan dampak bagi BMI yaitu Non-Performing Financing (NPF) mencapai lebih dari 60%, sehingga BMI mengalami kerugian sebesar Rp 105 miliar dengan jumlah ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal awal yang disetor. BMI kemudian bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) dan membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba.

Dalam majalah *Sharing* (2011) tentang Peta Bisnis Perbankan Syariah, pada Oktober 2012, BMI kembali mendapat penghargaan *The Best Islamic Bank in Indonesia* untuk yang keempat kalinya dari *Global Finance* dengan beberapa kriteria kuantitatif dan kualitatif dalam penilaiannya. Per kuartal III 2012, BMI mencatat Aset Rp 35,7 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp27,7 triliun, dan Pembiayaan senilai Rp27,9 triliun. Dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011, Aset BMI tumbuh 3 kali lipat. BMI juga mencatat pertumbuhan tinggi dalam pengembangan jaringan dimana per September 2012, jumlah kantor BMI sudah mencapai 413 unit. Jumlah ATM Muamalat per akhir kuartal III 2012 telah mencapai 745 unit.

Pada akhir 2011, industri perbankan syariah Indonesia dikejutkan oleh *Global Islamic Finance Report (GIFR) 2011* yang dikeluarkan oleh BMB Islamic, konsultan keuangan syariah berbasis di London. Kejutan ini kemudian diapresiasi baik oleh regulator, konsultan, maupun praktisi perbankan syariah di Indonesia. Kejutannya adalah, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam *Islamic Finance Country Index (IFCI)* setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi.

Indeks ini disusun dari berbagai variabel bobot, yaitu: populasi muslim, jumlah institusi terlibat dalam industri keuangan syariah, jumlah bank syariah, besaran aset keuangan syariah, besaran sukuk, infrastruktur legal dan regulator, rejim pengawas syariah, pendidikan dan kebudayaan. Laporan tersebut menyebutkan jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) - Bank Umum Syariah (BUS) yang didukung dengan kecepatan pertumbuhan dan ramalannya.

Menurut majalah *Sharing* (2011) tentang Peta Bisnis Perbankan Syariah, Bank Indonesia mencatat perbankan syariah bertumbuh sekitar 15-18,7% pada 2006-2010. Per 2010 sendiri, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 47,6%, jauh di atas perbankan nasional yang hanya 3,2%. Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Total Aset per-Oktober 2011 *yield on year (yoy)* telah mencapai Rp. 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10%

yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp. 3,35 triliun, total aset perbankan syariah per-Oktober 2011 telah mencapai Rp. 130,5 triliun. Market-share perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%.

Data Bank Indonesia ini ternyata senada dengan analisa BMB dalam IFCI 2011. Pertumbuhan BUS pada 2010 mencatat angka 64,9%, jauh di atas pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) yang hanya 1,4%. Dapat dimaklumi, karena 2009-2010 banyak UUS yang spin off (pemisahan) menjadi BUS. Alhasil, BUS menguasai 81% aset perbankan syariah nasional pada 2010.

Dalam perkembangannya, bank syariah tidak hanya diminati oleh umat Islam melainkan juga oleh umat non Islam, sehingga beberapa bank konvensional baik nasional maupun internasional banyak yang mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) yang berasal dari pendirian BUS baru, konversi dari bank, spin off dan konversi spin off. Hanya ada 2 bank yang betul-betul spin off yaitu PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dan PT. Bank Jabar & Banten Syariah (BJB Syariah). Berikut data Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan data statistik perbankan syariah sampai dengan Oktober 2012.

**Tabel 1.** Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011	Okt. 2012
Bank Umum Syariah					
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11
- Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.686
Unit Usaha Syariah					
- Jumlah Bank Umum Konv. yg memiliki UUS	27	25	23	24	24
- Jumlah Kantor	241	287	262	336	502
Bank Pembiayaan Syariah					
- Jumlah Bank	131	138	150	155	156
- Jumlah Kantor	202	225	286	364	386
Total Kantor	1.024	1.223	1.763	2.101	2.574

Sumber: Bank Indonesia, Oktober 2012

Berdasarkan uraian kinerja per LKS tersebut, terlihat banyak fenomena bisnis keuangan syariah yang menarik untuk dicermati, baik untuk keperluan evaluasi, forecasting, maupun pemetaan. Tak terkecuali dengan kinerja BNI Syariah yang melakukan spin off dari PT BNI (Persero) Tbk. pada tanggal 19 Juni 2010. Sebelum melakukan spin off menjadi BUS, BNI Syariah telah membukukan aset per 31 Maret 2010 senilai Rp.5,49 triliun. Sementara, total Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar Rp.4,2 triliun dan total pembiayaan sebesar Rp.3,2 triliun dengan customer based lebih dari 420 ribu nasabah. Setelah melakukan spin off, BNI Syariah mencatat aset per 31 Maret 2012 sebesar Rp. 9,22 triliun, total Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar Rp.6,9 triliun, dan total pembiayaan sebesar Rp.7,9 triliun dengan customer based lebih dari 715 ribu nasabah. Sedangkan BJB Syariah yang melakukan spin off dari PT Bank Jabar (Persero) Tbk pada bulan Mei 2010, memiliki jaringan kantor sebanyak 21 kantor yang terdiri dari 6

kantor cabang dan 15 kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten. BJB Syariah pada triwulan I 2011 telah membukukan aset Rp1,8 triliun, pembiayaan Rp1,59 triliun, penghimpunan DPK Rp1,14 triliun serta laba senilai Rp4,23 miliar.

Kinerja suatu bank sangat penting bagi keberlangsungan operasional bank tersebut, dikarenakan penurunan kinerja bank dapat menurunkan pula kepercayaan nasabah atau masyarakat terhadap bank tersebut. Begitu pula Pasal 2 ayat 1 didalam Peraturan Bank Indonesia No.PBI/13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga.

Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Disamping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank.

Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karenanya Bank Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana (Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru: 2006). Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas yang dikenal dengan CAMEL.

Penilaian prestasi dan kondisi keuangan pada suatu perusahaan membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, yang biasanya digunakan analisis rasio untuk menunjukan antara dua data keuangan. Penggunaan rasio keuangan merupakan cara yang paling umum dan mudah, sehingga banyak digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank. Begitu juga halnya dengan bank syariah di Indonesia, untuk mengukur kinerjanya masih menggunakan analisis rasio keuangan yang aturan yang digunakan oleh bank konvensional.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dapat diketahui agar dapat dimanfaatkan dan sebaliknya kelemahan pun harus dapat diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan mengadakan perbandingan kinerja perusahaan terhadap standar yang telah ditetapkan atau dengan membanding dengan periode-periode sebelumnya maka akan dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau sebaliknya yaitu mengalami kemunduran.

Kinerja suatu bank dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan dari bank tersebut. Rasio keuangan banyak dipakai oleh berbagai peneliti karena rasio keuangan terbukti berperan

penting dalam mengevaluasi kinerja dari suatu bank dan dapat pula digunakan sebagai alat untuk memprediksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat (Chen, 1981). Rasio-rasio keuangan dapat menggambarkan keadaan keuangan dari bank tersebut. Bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang baik bisa dikatakan kondisi/keadaan dari keuangan dari bank tersebut baik. Penelitian-penelitian yang menggunakan rasio-rasio keuangan yang diukur dengan rasio CAMEL telah banyak dilakukan untuk memprediksi kegagalan dan kesehatan dibidang perbankan.

Riset yang dilakukan Payamta dan Mas'ud Machfoedz (1999) tentang evaluasi kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengukur kinerja perbankan menggunakan rasio-rasio CAMEL. Rasio CAMEL yang digunakan CAR, RORA, NPM, ROA, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, rasio kredit terhadap dana yang diterima. Pengujian dilakukan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test dan uji Manova yang menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan kinerja bank yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah Initial Public Offering (IPO). Meskipun beberapa diantara rasio CAMEL (CAR, RORA dan CML) memberi indikasi adanya perbedaan kinerja yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah IPO, namun perbedaan kinerja tersebut sifatnya hanya temporer dan tidak konsisten.

Penelitian yang dilakukan Cristianti (2008) tentang analisis kinerja bank sebelum dan sesudah program rekapitalisasi, mengukur kinerja perbankan menggunakan rasio-rasio CAMEL. Rasio CAMEL yang digunakan CAR, RORA, NPM, ROA, rasio BOPO, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, rasio kredit terhadap dana yang diterima. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Beda Wilcoxon yang menghasilkan kesimpulan adanya perbedaan kinerja bank yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah program rekapitalisasi. Meskipun beberapa diantara rasio CAMEL (RORA, ROA dan BOPO) memberi indikasi tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah program rekapitalisasi.

Dalam melakukan penelitian ini, kinerja diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan atau rasio CAMEL (CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, FDR) berdasarkan laporan keuangan perusahaan per triwulan yang telah dipublikasikan dari bulan September tahun 2007 hingga bulan Desember tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan keenam rasio CAMEL BNI Syariah sebelum spin off dengan sesudah spin off, kemudian membandingkan keenam rasio CAMEL BNI Syariah sesudah spin off dengan BJB Syariah sesudah spin off. BJB Syariah dijadikan sebagai bank pembanding karena keberadaan BJB Syariah sama seperti BNI Syariah yaitu sama-sama melakukan spin off dari bank induk dan dilakukan pada waktu yang bersamaan yaitu bulan Mei tahun 2010.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sepengetahuan penulis, belum ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi institusi perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan guna menyusun langkah-langkah strategis perusahaan. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan data yaitu data setelah spin off hanya berjumlah 11 data untuk setiap variabel karena spin off baru dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah CAR, NPF, NPM, ROA,

ROE, dan FDR BNI Syariah sebelum spin off berbeda signifikan dibandingkan sesudah spin off?; (2) Apakah CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah sesudah spin off berbeda signifikan dibandingkan BJB Syariah sesudah spin off?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BNI Syariah sesudah spin off yang diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan (rasio CAMEL) serta membandingkannya dengan bank umum syariah lainnya. Adapun tujuan penelitian secara rinci adalah yaitu sebagai berikut: (a) Mengkaji kinerja BNI Syariah sebelum spin off dibandingkan sesudah spin off berdasarkan CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR (b) Mengkaji kinerja BNI Syariah sesudah spin off dibandingkan dengan kinerja BJB Syariah sesudah spin off berdasarkan CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kinerja Bank**

Pengertian Kinerja menurut Hidayah (2007) adalah suatu penilaian atas prestasi dan kondisi keuangan pada suatu perusahaan pada periode tertentu dan membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, dan biasanya yang digunakan dalam menganalisis rasio untuk menunjukkan antara dua data keuangan. Penggunaan rasio keuangan sampai saat ini masih digunakan karena merupakan cara yang paling umum dan mudah, sehingga banyak digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank. Begitu pula halnya bank syariah di Indonesia, sampai saat ini analisa rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan diketahui agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan membandingkan kinerja perusahaan terhadap standar yang telah ditetapkan atau dengan periode-periode sebelumnya, maka dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau mengalami kemunduran.

Menurut Kasmir (2008: 273), kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Sedangkan menurut Y. Sri Susilo, dkk. (1999: 22), Kinerja suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut Sri Susilo, dkk. (1999: 22) kinerja suatu bank merupakan bagian dari kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan, kegiatan tersebut meliputi: (1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri; (2) Kemampuan mengelola dana; (3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat; (4) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain; (5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Kinerja suatu bank dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan dari bank tersebut. Rasio keuangan banyak dipakai dalam berbagai penelitian karena rasio keuangan terbukti berperan penting dalam mengevaluasi kinerja dari suatu bank dan dapat pula digunakan sebagai alat untuk memprediksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat (Chen; 1981). Rasio keuangan juga dapat menggambarkan keadaan keuangan dari bank tersebut. Bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang baik bisa dikatakan kondisi/keadaan dari keuangan dari bank tersebut baik.

Menurut Kasmir (2008: 274) Salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu bank dengan menggunakan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian kinerja dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut:

- a. Capital (permodalan). Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Salah satu penilaiannya adalah dengan menggunakan metode CAR (*capital adequacy ratio*), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- b. Assets Quality (kualitas aset). Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu: (1) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif; (2) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.
- c. Management. Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum.
- d. Earnings (Rentabilitas). Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat dari kemampuan dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu: (1) Rasio laba terhadap total aset (Return on Asset); (2) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
- e. Liquidity (Likuiditas). Penilaian likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio, yaitu: (1) Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar; (2) Rasio antara kredit yang diberikan terhadap dana yang diperoleh bank.

Metode CAMEL adalah metode yang biasa digunakan oleh bank sentral hampir di seluruh dunia dalam melakukan penilaian terhadap kinerja suatu bank. Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menjaga dan mengendalikan bank-bank yang ada di dalam ruang lingkungannya. Dalam melakukan kontrol terhadap kinerja atau kesehatan bank, bank sentral mewajibkan bank-bank untuk melaporkan posisi keuangan secara berkala baik berupa laporan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran maupun laporan tahunan.

Sesuai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berlandaskan Prinsip Syariah. Berdasarkan BPI tersebut, tingkat kesehatan bank diukur dengan menggunakan 5 (lima) aspek, yaitu: Capital, Assets Quality, Management, Earnings, dan Liquidity atau lebih dikenal dengan sebutan CAMEL.

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip syariah itu sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir 13 yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Melalui prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

#### **Pemisahan Perusahaan (*Spin Off*)**

Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya terus mengalami pertumbuhan. Fenomena pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang terus bergerak naik serta dukungan pemerintah terhadap iklim investasi ini memberikan beberapa harapan terhadap perkembangan sektor riil dan sektor keuangan. Menanggapi fenomena tersebut, para pelaku perbankan syariah Indonesia turut aktif mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi negara. Bank-bank syariah yang berstatus unit usaha syariah melakukan spin off dalam rangka mengembangkan sayap bisnisnya. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Spin Off, yang mendorong bank syariah bersikap agresif dalam mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan pasarnya. Karena itu, menurut Hartomo, H.S., Direktur Batasa Tazkia Consulting, Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah, diunduh pada 13 Desember 2013 dari LPPI Web: <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/>, manajemen bank syariah dan UUS harus mampu menyeimbangkan tuntutan bisnis yang ada baik mengenai pengenalan produk yang semakin beragam dan juga tuntutan pasar.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pengertian pemisahan, yaitu pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan istilah spin off dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terdapat dalam penjelasan Pasal 135 Ayat (1) huruf b yaitu yang dimaksud dengan "pemisahan tidak murni" lazim disebut spin off. Pemisahan tidak murni (*spin off*) mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Sedangkan dalam perspektif Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *spin off* (pemisahan tidak murni) termasuk juga split off (pemisahan/pemisahan murni) adalah bentuk perubahan status perusahaan yang dapat menjadi salah satu alasan pemutusan hubungan kerja. Demikian juga, apabila terjadi spin off, maka otomatis terjadi perubahan pemberi kerja (*employer*) sehingga bagi pekerja new company secara hukum terjadi perubahan hubungan kerja dari existing corporation ke new

company. Selain itu, kemungkinan juga terjadi perubahan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban atau tata tertib perusahaan. Secara umum tujuan spin off perlu dilakukan dalam praktek perseroan terbatas di Indonesia. Pranata hukum spin off lazim dilakukan dalam dunia perbankan, hal ini dapat dilihat dalam praktek spin off khususnya berkaitan dengan masalah operasional lembaga bank itu sendiri.

Menurut Hartomo, H.S., Direktur Batasa Tazkia Consulting, Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah, diunduh pada 13 Desember 2013 dari LPPI Web: <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/>, pemisahan UUS menjadi BUS yang direncanakan oleh Bank Indonesia (BI) bisa meningkatkan laju industri keuangan syariah. Dalam jangka pendek, BUS atau bank baru itu akan mengalami persoalan likuiditas. Hal tersebut terjadi karena BUS harus menyediakan dana infrastruktur untuk penyiapan gedung kantor, SDM, dan teknologi informasi, dan dalam jangka panjang, BUS baru dituntut memiliki produktivitas yang agresif. Pasalnya, di tahun pertama BUS memerlukan konsolidasi dan pelatihan SDM yang memerlukan cukup banyak waktu. Sementara di tahun kedua, BUS baru melakukan take off (lepas landas), Kemudian di tahun ketiga, kemungkinan BUS baru bisa bergerak lancar karena produknya lebih banyak.

Meski peraturan spin off dilakukan untuk menunjang perkembangan pertumbuhan perbankan syariah, namun terkait ketentuan peraturan belum ada terobosan yang dilakukan. Selain itu yang menjadi kendala adalah bagi bank yang ingin melakukan spin off namun bank tersebut memiliki ekuitas di bawah Rp 2 triliun, sehingga bank tersebut harus mencari investor lain untuk memenuhi ketentuan permodalan yang telah ditetapkan. Karena dalam PBI No 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, dinyatakan bahwa penyertaan permodalan maksimal sebesar 25 persen, sehingga bank yang memiliki ekuitas di bawah Rp 2 triliun tidak dapat memanfaatkan peraturan tersebut. Apabila bank memiliki ekuitas di bawah Rp 2 triliun, sementara penyertaan modal maksimal 25 persen, maka modal spin off Rp 500 miliar tidak akan tercukupi. Oleh karena itu, untuk mendorong perkembangan BUS maka penyertaan modal sebaiknya 100 persen.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sistem ekonomi yang menggerakkan lembaga perbankan di Indonesia secara global dan mayoritas adalah sistem ekonomi konvensional dimana pendapatan dan pembiayaannya berbasis bunga (interest). Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang dalam aturan agamanya diharuskan untuk meninggalkan ekonomi berbasis bunga (riba). Sebagaimana difirmankan dalam Al Quran pada Surat Al Baqarah Ayat 275 yaitu:

“Orang-orang yang memakan riba (keuntungan yang diperoleh dengan cara meminjamkan uang atau benda dengan syarat pengembaliannya harus lebih) tiada berdirinya orang yang kemasukan setan dengan sentuhan kepadanya yang denikian itu karena mereka berkata: “sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Maka barangsiapa menerima pelajaran dari Tuhannya, lalu berhenti (melakukan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa kembali (melakukannya), mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Surat Al Baqarah ayat 278:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman.”

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka bagi masyarakat yang beragama Islam terdapat pertentangan sikap batin, hal ini disebabkan secara nyata mereka membutuhkan lembaga bank untuk mempermudah dalam transaksi ekonomi mereka sehari-hari namun dari sisi hukum agama, mereka sebenarnya tidak menginginkan lembaga bank yang berbasis bunga. Pertentangan dari aspek ideology dan hukum inilah yang mendasari perlu dilakukannya pemisahan/spin off. Selain itu dari sisi operasional, spin off dilakukukan dengan tujuan untuk menjaring konsumen yang memiliki pangsa pasar yang berbeda dari perusahaan induknya yang telah eksis sebelum terjadi pemisahan perusahaan, misalnya saja dalam praktik di Indonesia terdapat pemisahan usaha antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan PT Bank BNI Syariah yang dalam hal ini berlaku pranata hukum original spin off, yaitu secara permodalan, pembukuan, manajerial, dan tipe nasabah/konsumen jasa perbankan memiliki perbedaan yang mendasar yaitu dipisahkan oleh ideologi ekonomi yang dianut oleh nasabah/konsumen itu sendiri.

Menurut Karim (2008), Saat Tepat Pemisahan Bank Syariah, diakses pada 13 Desember 2012 dari Media Indonesia web: <http://shariaekonomi.blogspot>, bahwa yang terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah soal pemisahan (*spin off*) bank syariah. Ada tiga yang perlu dicermati yaitu:

- a. Ketepatan waktu dan kesiapan bank syariah melaksanakan spin off. Ide tentang *spin off* muncul atas keinginan untuk mengembangkan bank syariah lebih cepat dan luas. Saat yang tepat untuk melakukan spin off dapat dilakukan ketika bank syariah siap dengan konsekuensi yang muncul. Seperti pengembangan organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi (TI). Bank syariah membutuhkan tambahan tenaga untuk mengisi pos-pos yang sebelumnya di-back up oleh bank induk, seperti fungsi treasury, fungsi legal, fungsi audit, fungsi human resources, dan fungsi manajemen risiko. Tenaga yang telah ada pun perlu mendapat suntikan atmosfer baru dari atmosfer sebuah divisi menjadi sebuah bank. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perubahan manajemen. Untuk bidang TI juga membutuhkan sebuah unit yang berdiri sendiri sehingga memerlukan biaya investasi.
- b. Aspek regulasi terkait rencana spin off. BI telah menerbitkan PBI No 7/35 tanggal 25 September 2005 yang menurunkan persyaratan modal disetor dari Rp 3 triliun menjadi Rp 1 triliun. Peraturan tersebut terkait dengan PBI No 7/13 tanggal 10 Juni 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI No. 7/13/2005 ini, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Artinya, ketika bank syariah akan spin off diasumsikan bahwa jumlah asetnya telah mencapai Rp.12,5 triliun ( $100/8 \times \text{Rp}1 \text{ triliun}$ ).
- c. Penerapan kebijakan yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian oleh BI ini perlu dikaji lebih lanjut, sehingga spin off dapat terealisasi dengan baik. Asumsi pelaksanaan spin off yang memerlukan jumlah aset Rp.12,5 triliun patut dipertimbangkan apabila kita membandingkan pencapaian aset perbankan syariah per September 2005 sebesar Rp.18,7 triliun yang memerlukan waktu 13 tahun. Oleh karena itu, perlu dikaji penerapan regulasi yang lebih fleksibel dan bertahap sehingga berbagai peraturan yang diterbitkan BI bisa mendorong perkembangan perbankan syariah dengan tetap memerhatikan aspek kehati-hatian.

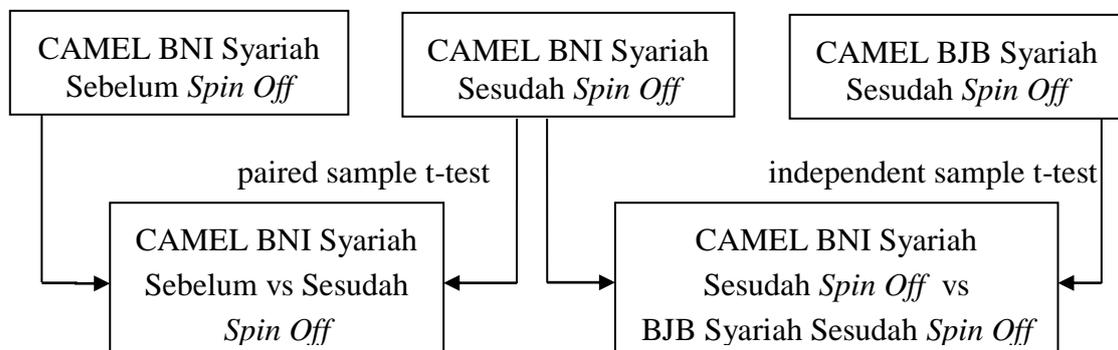
Dalam mengimplementasikan *spin off*, membutuhkan strategi sehingga dapat terwujud dengan baik. Strategi pertama yang mengemuka ketika ide spin off ini berkembang adalah bank induk melakukan spin off terhadap unit usaha syariah ketika

sudah mencapai suatu jumlah aset atau pangsa pasar tertentu. Strategi kedua yang bisa dikembangkan adalah melakukan konversi aset bank induk dan membeli bank kecil untuk dikonversi. Pilihan untuk melakukan konversi terhadap existing aset bank induk konvensional akan mempercepat proses spin off yang akan dilakukan. Proses ini membutuhkan dorongan kuat dari bank induk sehingga proses konversi aset dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi ketiga dalam melaksanakan spin off adalah membeli suatu bank kecil untuk dikonversi menjadi bank syariah yang nanti akan digabungkan dengan unit usaha syariah bank induk. Spin off mempunyai tujuan baik untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Namun tujuan yang baik tersebut harus disikapi dan dilaksanakan secara cerdas dalam waktu tepat sehingga pilihan spin off tidak menjadi blunder bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

### Rerangka Pemikiran

Berdasarkan SEBI tersebut dan berbagai penelitian terdahulu yang sejenis, maka peneliti melakukan analisa terhadap kinerja PT Bank BNI Syariah sesudah spin off dengan menggunakan rasio-rasio keuangan melalui metode CAMEL (Capital yang dihitung melalui CAR, Asset yang dihitung melalui NPF, Management yang dihitung melalui NPM, Earning yang dihitung melalui ROA dan ROE, Liquidity yang dihitung melalui FDR). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan keuangan bank yang telah dipublikasikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Rerangka Pemikiran Analisis Perkembangan Kinerja BNI Syariah sebelum dan sesudah Spin Off serta dibandingkan dengan BJB Syariah sesudah spin off.

### Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisa Kinerja BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off dengan menggunakan Uji Paired Sample T-Test
  - Ho : CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dengan sesudah spin off.
  - Ha : CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah sebelum spin off berbeda signifikan dibandingkan sesudah spin off.

b. Analisa Kinerja BNI Syariah dan BJB Syariah sesudah spin off dengan menggunakan Uji Independent Sample T-Test. Dalam melakukan Uji Independent Sample T-Test, terdapat tahapan Uji Varian dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Varians populasi CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah dan BJB Syariah sesudah spin off adalah sama.

Ha : Varians populasi CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah dan BJB Syariah sesudah spin off adalah tidak sama (berbeda).

Sedangkan hipotesis untuk menentukan perbedaan kinerja BNI Syariah sesudah spin off dengan BJB Syariah sesudah spin off adalah:

Ho : CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan BJB Syariah sesudah spin off.

Ha : CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah sesudah spin off BNI Syariah sesudah spin off berbeda signifikan dengan BJB Syariah sesudah spin off.

## **METODE**

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk menganalisa kinerja BNI Syariah sesudah spin off. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi penelitian adalah data kinerja BNI Syariah dan BJB Syariah yang berupa rasio keuangan dengan berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan setiap triwulan. Sedangkan sampel penelitian untuk pengujian hipotesis yang pertama adalah laporan keuangan BNI Syariah per triwulan dari tahun 2007 hingga tahun 2012 atau periode 3 tahun sebelum spin off (2007-2009) dan 3 tahun sesudah spin off (2010 – 2012), yaitu: (1) Laporan Keuangan BNI Syariah Triwulan III, dan IV Tahun 2007; (2) Laporan Keuangan BNI Syariah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2008; (3) Laporan Keuangan BNI Syariah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2009; (4) Laporan Keuangan BNI Syariah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2010; (5) Laporan Keuangan BNI Syariah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2011; (6) Laporan Keuangan BNI Syariah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2012.

Sampel penelitian untuk menguji hipotesis yang kedua adalah laporan keuangan BNI Syariah dan BJB Syariah per triwulan dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Laporan keuangan tahun 2010 hingga tahun 2012 merupakan laporan keuangan periode 3 tahun sesudah BNI Syariah dan BJB Syariah spin off dari induknya, yaitu: (1) Laporan Keuangan BNI Syariah dan BJB Syariah Triwulan II, III, dan IV Tahun 2010; (2) Laporan Keuangan BNI Syariah dan BJB Syariah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2011; (3) Laporan Keuangan BNI Syariah dan BJB Syariah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2012

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder time series berupa laporan keuangan per triwulan yang telah dipublikasikan oleh BNI Syariah selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan laporan keuangan per triwulan yang telah dipublikasikan oleh BJB Syariah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan terdaftar di direktori Bank Indonesia.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah Uji paired sample t-test dan Uji independen sample t-test. Uji paired sample t-test adalah merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu group. Artinya pula analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel berpasangan. Uji paired sample t-test pada penelitian ini digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu dengan membandingkan CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah sebelum dengan sesudah spin off, apakah berbeda signifikan. Data yang digunakan adalah data kinerja BNI Syariah sebelum spin off (tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan data per triwulan) dan data kinerja BNI Syariah setelah spin off (tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan data per triwulan).

Sedangkan Uji independen sample t-test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi dan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Uji independen sample t-test dilakukan dalam dua tahapan, tahapan pertama adalah menguji apakah varians dari dua populasi bisa dianggap sama. Setelah itu, baru dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata populasi. Pada dasarnya, uji t mensyaratkan adanya kesamaan varians dari dua populasi yang diuji. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka SPSS akan menyediakan alternatif jawaban uji t yang lain.

Uji independen sample t-test digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu dengan membandingkan CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR BNI Syariah sesudah spin off dengan BJB Syariah sesudah spin off, apakah berbeda signifikan. Prosedur pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan prosedur uji selisih rata-rata dimana:  $\alpha = 0,05$  dan Daerah kritis:  $H_0$  ditolak jika  $\text{sig.} < \alpha$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja BNI Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin Off*

Data kinerja BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off (tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 per triwulan) terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov dan transformasi data dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Data Variabel BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off

---

Rasio	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>	
	Uji-1	Uji-2

---

	N	Statistic	Sig.	Statistic	Sig.
CAR Sebelum Spin Off	11	.200	.200	-	-
CAR Sesudah Spin Off	11	.139	.200	-	-
NPF Sebelum Spin Off	11	.197	.200	-	-
NPF Sesudah Spin Off	11	.143	.200	-	-
NPM Sebelum Spin Off	11	.324	.200	-	-
NPM Sesudah Spin Off	11	.234	.002	.322	.002
ROA Sebelum Spin Off	11	.289	.092	-	-
ROA Sesudah Spin Off	11	.363	.000	.192	.200
ROE Sebelum Spin Off	11	.202	.200	-	-
ROE Sesudah Spin Off	11	.365	.000	.297	.007
FDR Sebelum Spin Off	11	.271	.023	.204	.200
FDR Sesudah Spin Off	11	.412	.000	.323	.002

Berdasarkan pada Tabel 1. maka diperoleh simpulan bahwa dari hasil uji kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov, data variabel yang tidak berdistribusi normal adalah NPM, ROA, ROE sesudah spin off serta FDR sebelum dan sesudah spin off karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, untuk memperoleh data berdistribusi normal, maka kelima data yang tidak berdistribusi normal tersebut dilakukan pengujian yang kedua melalui manipulasi data dengan mentransformasi data variabel NPM, ROA, ROE sesudah spin off serta FDR sebelum dan sesudah spin off. Hasil dari uji normalitas yang kedua, masih ada 3 data variabel yang tidak berdistribusi normal yaitu NPM, ROE, dan FDR sesudah spin off karena nilai signifikansinya masih di bawah 5 persen.

Setelah dilakukan uji kenormalan, kemudian dilakukan uji t untuk data variabel CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, FDR dengan menggunakan metode analisa paired sample t test dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2.** Hasil Uji Paired Sample t-test BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off

Rasio	Mean Sebelum Spin Off (%)	Mean Sesudah Spin Off (%)	N	Sig. (2-tail)
CAR	17,1582	22,0764	11	0.116
NPF	2,5936	2,0145	11	0.264
NPM	6,2482	7,8336	11	0.011
ROA	1,0745	0,1418	11	0.530
ROE	10,8600	1,0818	11	0.270
FDR	80,0109	86,2664	11	0.317

Berdasarkan pada Tabel 2 terlihat bahwa angka probabilitas untuk variabel CAR, NPF, ROA, ROE dan FDR BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off adalah lebih besar dari 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, maka CAR, NPF, ROA, ROE dan FDR BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dengan sesudah spin off. Sedangkan angka probabilitas untuk variabel NPM BNI Syariah sebelum dan sesudah spin

off di bawah 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya NPM BNI Syariah sebelum spin off berbeda signifikan dengan sesudah spin off. Berdasarkan hasil pengujian statistik tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dengan kinerja BNI Syariah sesudah spin off.

Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja BNI Syariah sebelum dengan sesudah spin off karena penelitian dilakukan pada saat BNI Syariah baru 2 tahun 6 bulan melakukan spin off sehingga efek/manfaat dari BNI Syariah melakukan spin off belum dapat terlihat. Jumlah modal yang besar yang dimiliki BNI Syariah belum dapat dikelola secara optimal, walaupun ada yang telah dikelola digunakan untuk investasi jangka panjang sehingga manfaat/keuntungannya belum terlihat dalam jangka pendek. Selain itu, BNI Syariah belum dapat mengendalikan beban operasional yang tinggi akibat kegiatan spin off sedangkan jumlah modal yang dimilikinya besar sehingga rata-rata ROE BNI Syariah sesudah spin off lebih rendah (turun) sebesar 9,78% dibandingkan sebelum spin off.

### **CAR BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off**

Nilai signifikansi CAR BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off adalah sebesar 0,116 ( $\alpha > 0,05$ ) artinya bahwa CAR BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dibandingkan CAR BNI Syariah sesudah spin off. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata CAR sebelum spin off adalah sebesar 17% dan sesudah spin off adalah sebesar 22%, maka dapat diartikan bahwa nilai rata-rata CAR BNI Syariah sesudah spin off hanya berbeda 5% lebih besar dibandingkan CAR BNI Syariah sebelum spin off.

Kondisi tersebut dikarenakan sesudah spin off BNI syariah mendapat suntikan dana sebesar 1 triliun, sehingga akan berdampak kepada peningkatan nilai CAR. Seharusnya dengan adanya suntikan dana tersebut CAR BNI Syariah bisa lebih baik, namun CAR BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off tidak berbeda signifikan. Hal ini disebabkan suntikan dana tersebut digunakan untuk modal kerja dan investasi pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dalam rangka pengembangan usahanya. Disamping itu, Bank Indonesia memberikan ketentuan kepada perbankan memiliki CAR minimal sebesar 8% yang menyebabkan bank selalu menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai dengan ketentuan.

### **NPF BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off**

Nilai signifikansi NPF BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off adalah sebesar 0,264 ( $\alpha > 0,05$ ) artinya bahwa NPF BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dibandingkan sesudah spin off. Hal ini terlihat dari angka rata-rata NPF sebelum spin off adalah sebesar 2,59% dan sesudah spin off adalah sebesar 2,01%, maka dapat diartikan bahwa rata-rata NPF BNI Syariah sesudah spin off lebih baik 0,58% dibandingkan NPF BNI Syariah sebelum spin off atau kualitas aktiva produktif BNI Syariah setelah spin off lebih baik dibandingkan dengan sebelum spin off.

Kondisi tersebut dapat disebabkan yaitu: pertama, BNI Syariah setelah spin off mendapat suntikan dana sebesar Rp 1 triliun yang sebagian dialokasikan kepada pembiayaan; kedua, BNI Syariah setelah spin off semakin baik dari aspek pengawasan, sehingga berdampak kepada kualitas pembiayaan lebih baik (NPF sesudah spin off < NPF sebelum spin off). Namun dikarenakan tambahan modal yang diterima BNI Syariag sesudah spin off lebih banyak digunakan sebagai modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usahanya dibandingkan untuk penyaluran pembiayaan, maka NPF BNI

Syariah sebelum dan sesudah spin off tidak berbeda signifikan.

### **NPM BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off**

Nilai signifikansi NPM BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off adalah sebesar 0,011 ( $\alpha < 0,05$ ) artinya NPM BNI Syariah sebelum spin off berbeda signifikan dibandingkan NPM BNI Syariah sesudah spin off. Nilai rata-rata NPM sebelum spin off adalah sebesar 6,25% dan sesudah spin off adalah sebesar 7,83%, maka dapat diartikan bahwa kualitas manajemen BNI Syariah setelah spin off yang diukur dari kemampuannya memperoleh margin lebih baik sebesar 1,58% dibandingkan sebelum spin off.

Hal tersebut di atas terjadi dikarenakan manajemen BNI Syariah sesudah spin off relatif lebih fokus mengelola bisnisnya, lebih independen, fleksibel serta lebih responsif dan agresif, sehingga manajemen BNI Syariah sesudah spin off bisa menyalurkan pembiayaan lebih baik yang berdampak kepada peningkatan pendapatan margin, namun pencapaian keuntungan (margin) tersebut masih belum maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kemungkinan aktiva produktif yang dimiliki tidak semuanya dalam bentuk pembiayaan (sektor riil) tetapi masih banyak yang ditempatkan dalam bentuk surat berharga dimana tingkat bagi hasil yang akan diperoleh BNI Syariah relatif lebih kecil dibanding dengan penempatan dalam bentuk pembiayaan.

### **ROA BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off**

Nilai signifikansi ROA BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off adalah sebesar 0,53 ( $\alpha > 0,05$ ) artinya bahwa ROA BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dengan ROA BNI Syariah sesudah spin off. Nilai rata-rata ROA sebelum spin off adalah sebesar 1,07% dan sesudah spin off adalah sebesar 0,14%, artinya bahwa rata-rata tingkat profitabilitas BNI Syariah yang dihasilkan dari pengelolaan aset sebelum spin off tidak berbeda atau lebih rendah 0,93% dibandingkan sesudah spin off.

Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sesudah spin off, manajemen BNI Syariah lebih selektif dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga dalam pencapaian laba dari total aktiva yang dimiliki masih belum optimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kemungkinan jumlah aktiva tetapnya (fixed asset) terlalu besar sehingga beban depresiasinya juga besar dan pada akhirnya akan menggerus laba perusahaan.

### **ROE BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off**

Nilai signifikansi ROE BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off adalah sebesar 0,27 ( $\alpha > 0,05$ ) artinya ROE BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dibandingkan ROE BNI Syariah sesudah spin off. Nilai rata-rata ROE BNI Syariah sebelum spin off adalah sebesar 10,86% dan sesudah spin off adalah sebesar 1,08%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat profitabilitas BNI Syariah yang berasal dari ekuitas sebelum spin off secara rata-rata tidak berbeda atau menurun 9,78% dibandingkan dengan sesudah spin off.

Kondisi tersebut di atas disebabkan karena setelah spin off, manajemen BNI Syariah belum dapat mengendalikan biaya-biaya yang diakibatkan karena kegiatan spin off seperti investasi pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Biaya-biaya tersebut berdampak pada penurunan tingkat profitabilitas perusahaan. Selain itu, sesudah spin off, BNI Syariah juga mendapat tambahan modal sebesar Rp 1 triliun yang secara langsung menambah jumlah equity BNI Syariah, namun equity tersebut belum

dapat dikelola secara maksimal untuk perolehan laba atau dampak perolehan labanya belum dapat dirasakan dalam jangka pendek karena digunakan untuk investasi jangka panjang.

### FDR BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off

Nilai signifikansi FDR BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off adalah sebesar 0,317 ( $\alpha > 0,05$ ) artinya FDR BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dibandingkan FDR BNI Syariah sesudah spin off. Nilai rata-rata FDR sebelum spin off adalah sebesar 80,01% dan sesudah spin off adalah sebesar 86,27%. Hal ini berarti bahwa rata-rata tingkat likuiditas BNI Syariah sebelum spin off hanya berbeda lebih besar 6,26% dibandingkan sesudah spin off.

Kondisi tersebut di atas dapat disebabkan karena setelah spin off, BNI Syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih banyak menggunakan dana modalnya atau belum mengoptimalkan pengelolaan dana pihak ketiga yang dimilikinya. Apabila melihat pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/198PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, yaitu batas bawah FDR adalah sebesar 78% dan batas atas adalah sebesar 100%, maka rata-rata FDR BNI Syariah sebelum dan sesudah spin off berada diambang batas aman.

### Kinerja BNI Syariah Sesudah Spin Off Dibandingkan Dengan Kinerja BJB Syariah Sesudah Spin Off

Data kinerja BNI Syariah dan BJB Syariah sesudah spin off dari Triwulan II Tahun 2010 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2012 terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov dan transformasi data dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3.** Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov  
Data Variabel BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah Spin Off

Rasio	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>				
	Uji-1			Uji-2	
	N	Statistic	Sig.	Statistic	Sig.
CAR	22	0.115	.200	-	-
NPF	22	0.139	.200	-	-
NPM	22	0.193	.032	.336	.000
ROA	22	0.294	.000	.319	.000
ROE	22	0.335	.000	.296	.000
FDR	22	0.223	.006	.151	.200

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa dari hasil uji kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov hanya data variabel rasio CAR dan NPF yang berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk data variabel NPM, ROA, ROE, dan FDR tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, keempat data variabel tersebut dilakukan pengujian kedua melalui

manipulasi data dengan mentransformasi data variabel NPM, ROA, ROE, serta FDR dan menghasilkan hanya FDR yang signifikansinya menjadi di atas 0,05, sedangkan NPM, ROA, dan ROE nilai signifikansinya masih di bawah 0,05 sehingga data untuk ketiga variabel tersebut tidak berdistribusi normal.

Setelah dilakukan uji kenormalan, kemudian dilakukan uji t dua sample untuk data variabel CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, FDR BNI Syariah dan BJB Syariah sesudah spin off dengan menggunakan Independent Sample Test, diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 4.** Hasil Uji Independent Sample Test BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah Spin Off

Rasio	Equality of Variance (Sig.)		N	Mean. BNI Syariah (%)	Mean BJB Syariah (%)	Sig. (2-tailed)
	F	Sig.				
CAR	0,137	.715	11	22,0764	31,3509	.003
NPF	6,049	.023	11	2,0145	1,3036	.111
NPM	0,232	.635	11	7,8336	7,5436	.731
ROA	2,453	.133	11	0,1418	0,7536	.643
ROE	3,858	.064	11	1,0818	1,7609	.920
FDR	0,657	.427	11	86,2700	106,9218	.031

Berdasarkan Tabel 4 di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi dari hasil uji kesamaan varian (homogenitas) dengan F test (Levene,s Test), data variabel CAR, NPM, ROA, ROE, dan FDR lebih besar dari 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ) artinya bahwa Uji t menggunakan equal variances assumed (diasumsikan varian sama), sedangkan untuk data variabel NPF menggunakan data Uji t equal variances not assumed (diasumsikan varian tidak sama) karena nilai signifikansinya di bawah 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ).

Berdasarkan hasil Uji t, nilai signifikansi untuk variabel NPF, NPM, ROA, dan ROE adalah di atas 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ) maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa NPF, NPM, ROA, dan ROE BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan BJB Syariah sesudah *spin off*. Sedangkan nilai signifikansi CAR dan FDR di bawah 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa ada perbedaan signifikan antara rata-rata CAR dan FDR BNI Syariah sesudah spin off dengan rata-rata CAR dan FDR BJB Syariah sesudah spin off. Sehubungan dengan hasil pengolahan data tersebut, maka secara umum dapat diartikan bahwa kinerja BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan kinerja BJB Syariah sesudah *spin off*.

#### **CAR BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah Spin Off**

Nilai signifikansi CAR BNI Syariah dan BJB Syariah sesudah spin off dengan equal variance assumed adalah 0,003 ( $\alpha < 0,05$ ) artinya bahwa rata-rata CAR BNI Syariah sesudah spin off berbeda signifikan dengan rata-rata CAR BJB Syariah sesudah spin off. Nilai rata-rata CAR BNI Syariah sesudah spin off sebesar 22,08% dan BJB Syariah adalah sebesar 31,35%. Artinya bahwa aspek permodalan BJB Syariah setelah spin off lebih tinggi 9,27% dibandingkan dengan BNI Syariah. Namun hal tersebut bukan berarti BJB Syariah lebih baik dari BNI Syariah, kemungkinan BJB Syariah tidak menggulirkan modalnya ke sektor riil sehingga terjadi idle. Namun aspek permodalan kedua bank tersebut cukup aman karena ketentuan CAR dari Bank Indonesia adalah minimal sebesar 8% dan dengan ketentuan tersebut mengakibatkan bank-bank selalu berusaha menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai dengan ketentuan.

### **NPF BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah *Spin Off***

Nilai signifikansi NPF dengan equal variance not assumed adalah 0,111 atau lebih besar dari 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ), artinya bahwa rata-rata NPF BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan rata-rata NPF BJB Syariah sesudah spin off. Nilai rata-rata NPF BNI Syariah sesudah spin off adalah sebesar 2,01% dan BJB Syariah sebesar 1,3%. Rata-rata kualitas aktiva produktif BJB Syariah sesudah spin off lebih baik 0,71% dibandingkan dengan BNI Syariah.

Kondisi tersebut di atas disebabkan karena yaitu: pertama, setelah spin off BNI syariah dan BJB Syariah mendapat tambahan dana untuk menambah modal kerja dan sebagian modalnya dialokasikan kepada pembiayaan; kedua, setelah spin off, baik BNI syariah maupun BJB Syariah semakin baik aspek pengawasannya. Kedua hal tersebut dapat membuat kualitas pembiayaan lebih bagus sehingga rasio NPF turun. Rata-rata rasio NPF setelah spin off, baik BNI Syariah (2,015%) maupun BJB Syariah (1,3%) masih diambang batas aman yaitu maksimum sebesar 5 persen.

### **NPM BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah *Spin Off***

Nilai signifikansi NPM dengan equal variance assumed adalah 0,731 atau lebih besar ( $\alpha > 0,05$ ) artinya bahwa rata-rata NPM BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan rata-rata NPM BJB Syariah sesudah *spin off* dengan perbedaan rata-rata (*mean difference*) hanya sebesar 0,29%. Nilai rata-rata NPM BNI Syariah sesudah spin off adalah sebesar 7,83% dan untuk BJB Syariah sebesar 7,54%. Berdasarkan angka tersebut, dapat diartikan bahwa kualitas manajemen BNI Syariah sesudah spin off yang diukur berdasarkan kemampuannya memperoleh margin lebih baik sebesar 0,29% dibandingkan dengan BJB Syariah.

Kondisi tersebut terjadi karena manajemen BNI Syariah dan BJB Syariah setelah spin off lebih fokus mengelola bisnisnya, lebih independen, fleksibel serta lebih responsif dan agresif, sehingga BNI Syariah dan BJB Syariah dapat menyalurkan pembiayaan lebih baik yang berdampak kepada peningkatan pendapatan margin.

### **ROA BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah *Spin Off***

Nilai signifikansi ROA sesudah spin off dengan equal variance assumed adalah 0,643 atau di atas 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ), artinya bahwa rata-rata ROA BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan rata-rata ROA BJB Syariah. Perbedaannya hanya sebesar 0,61%. Nilai rata-rata ROA BNI Syariah sesudah spin off adalah sebesar 0,14% dan BJB Syariah adalah sebesar 0,75%. Artinya bahwa tingkat perolehan laba atau profitabilitas BJB Syariah sesudah *spin off* yang berasal dari hasil pengelolaan asset lebih baik sebesar 0,61% dibandingkan dengan BNI Syariah.

Sepertinya halnya dengan perolehan rasio NPM, BNI Syariah dan BJB Syariah setelah *spin off* lebih fokus, independen, fleksibel, responsif, dan agresif dalam mengelola bisnisnya, termasuk dalam menyalurkan pembiayaannya sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan margin.

**ROE BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah *Spin Off*.** Nilai Signifikansi ROE sesudah spin off dengan equal variance assumed adalah 0,92 atau di atas 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ), artinya bahwa rata-rata ROE BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan rata-rata ROE BJB Syariah. Perbedaannya adalah sebesar 0,68%. Nilai rata-rata ROE BNI

Syariah sesudah *spin off* adalah sebesar 1,08% dan BJB Syariah 1,76%. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat perolehan laba atau profitabilitas BJB Syariah sesudah *spin off* yang berasal dari pengelolaan modal atau ekuitas lebih tinggi sebesar 0,68% dibandingkan BNI Syariah.

Kondisi tersebut terjadi karena setelah *spin off*, BNI Syariah dan BJB Syariah masih belum bisa mengendalikan biaya-biaya yang ditimbulkan dari kegiatan setelah *spin off* seperti investasi pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang berdampak kepada melambatnya peningkatan profitabilitas perusahaan karena keuntungan atau manfaat dari investasi jangka panjang belum dapat dirasakan secara langsung pada awal-awal tahun setelah investasi. Selain itu, kurangnya optimalisasi penggunaan modal juga berdampak kepada penurunan nilai ROE.

### **FDR BNI Syariah dan BJB Syariah Sesudah *Spin Off***

Nilai signifikansi FDR sesudah *spin off* dengan equal variance assumed adalah 0,31 atau di atas 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ), artinya bahwa rata-rata FDR BNI Syariah sesudah *spin off* tidak berbeda signifikan dengan rata-rata FDR BJB Syariah. Nilai rata-rata FDR BNI Syariah sesudah *spin off* adalah sebesar 86,27% dan BJB Syariah sebesar 106,92%. Artinya bahwa tingkat likuiditas BNI Syariah sesudah *spin off* lebih baik sebesar 20,66% dibandingkan BJB Syariah. Kondisi tersebut juga dapat diartikan bahwa BJB Syariah lebih ekspansif dalam mengelola dana pihak ketiganya melalui pembiayaan dibandingkan BNI Syariah.

Apabila melihat pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/198PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, yaitu batas bawah FDR adalah sebesar 78% dan batas atas adalah sebesar 100%, maka rata-rata FDR BNI Syariah berada dalam ambang batas ketentuan BI yaitu sebesar 86,27%. Sedangkan rata-rata FDR BJB Syariah berada di atas ambang batas atas ketentuan BI yaitu sebesar 106,92%. Hal ini berarti BJB Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya melebihi jumlah dana pihak ketiga yang diterimanya dan menggunakan dana modal yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan paired sample t-test dan independent sample t-test di atas, telah memperkuat hasil penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang menggunakan rasio-rasio CAMEL bahwa perubahan atau perbedaan signifikan dari suatu fase atau kondisi sebelumnya belum dapat dilihat dalam periode jangka pendek dan apabila terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut tidak konsisten karena kinerja bank terus mengalami perkembangan. Kemudian apabila dilihat dari rata-rata rasio keuangannya, kedua bank memiliki rasio keuangan yang baik serta bisa dikatakan dalam kondisi keuangan yang baik.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

**Pertama.** Kinerja BNI Syariah sebelum *spin off* tidak berbeda signifikan dengan kinerja BNI Syariah sesudah *spin off*. Hal tersebut terbukti dari 6 variabel yang dinilai (CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, FDR) hanya variabel NPM yang berbeda signifikan dengan perbedaan nilai rata-rata hanya sebesar 1,58%. Kondisi tersebut dikarenakan setelah *spin off*, BNI Syariah mendapat tambahan modal sebesar Rp 1 triliun yang digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pengembangan organisasi, sumber daya

manusia, dan teknologi informasi sehingga keuntungan/manfaatnya yang berdampak kepada profitabilitas belum dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, BNI Syariah belum dapat mengendalikan biaya-biaya yang diakibatkan karena kegiatan spin off sehingga tingkat profitabilitas perusahaan setelah spin off menurun. Namun, sesudah spin off, BNI Syariah lebih berani dalam menyalurkan dana pihak ketiga melalui ekspansi pembiayaan dibanding sebelum spin off. **Kedua.** Secara umum, kinerja BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan kinerja BJB Syariah sesudah spin off. Hal ini terbukti dari 6 variabel yang dinilai (CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, FDR), untuk variabel NPF, NPM, ROA, dan ROE hasilnya tidak berbeda signifikan. Sedangkan untuk rasio CAR dan FDR, ada perbedaan signifikan antara rata-rata CAR dan FDR BNI Syariah sesudah spin off. Dalam aspek permodalan, CAR BJB Syariah lebih tinggi 9,27% dibandingkan dengan BNI Syariah dan untuk variabel FDR, tingkat likuiditas BNI Syariah sesudah spin off lebih baik sebesar 20,66% dibandingkan BJB Syariah. Kondisi tersebut terjadi karena setelah spin off, BNI Syariah dan BJB Syariah masih belum bisa mengendalikan biaya-biaya yang ditimbulkan dari kegiatan setelah spin off seperti pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga peningkatan profitabilitas perusahaan melambat karena keuntungan atau manfaat dari investasi tersebut belum dapat dirasakan secara langsung pada awal-awal tahun.

**Implikasi.** Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka implikasi yang dapat diajukan pada penelitian ini yaitu bahwa secara empiris terbukti bahwa spin off tidak membuat kinerja BNI Syariah dan BJB Syariah menjadi lebih baik dalam jangka pendek karena perusahaan masih dalam tahap pengelolaan modal yang dimilikinya dan modal tersebut dalam jumlah besar. Perusahaan mengelola modal tersebut untuk investasi jangka panjang, sehingga potensi spin off akan terlihat manfaatnya lebih baik bagi perusahaan dalam jangka panjang, karena dengan melakukan spin off perusahaan perusahaan memiliki ruang gerak usaha lebih luas dan fleksibel dibandingkan sebelum spin off sehingga perusahaan dapat lebih meningkatkan kegiatan usahanya.

**Saran.** Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Adanya peraturan/ketentuan tentang bagaimana investor bisa lebih mudah untuk mendirikan BUS sehingga hal tersebut akan dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perbankan syariah; (2) Bank Syariah perlu meningkatkan sosialisasi dan pengembangan produk perbankan syariah yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan dapat menggunakan nama serta istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat umum; (3) Mengefektifkan peran Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia khususnya Direktorat Perbankan Syariah dalam penegakkan kepatuhan syariah atas setiap produk bank syariah; (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah melalui institusi pendidikan formal dan pengembangan ilmu pengetahuan; (5) Mengembangkan penelitian yang sejenis dengan menggunakan rasio-rasio yang lebih komprehensif dilihat dari berbagai aspek termasuk solvabilitas dan sensitifitas terhadap pangsa pasar serta menggunakan data dengan periode waktu yang relatif lebih panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2011) *Spin off Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah*. Diakses pada 13 Desember 2012 dari LPPi Web:

- <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/>.
- Afrizal. (2009) *Sebuah Analisis Tentang Spin Off*. Diakses pada 13 Desember 2012 dari blogspot Afrizal web <http://www.afickafrizal.blogspot.com/2009/01/sebuah-analisis-tentang-spin-off.html>
- Bank Indonesia. (2011) *Kebijakan dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Diakses pada 20 Maret 2012 dari Bank Indonesia Web: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>.
- Christanti, Paramita Lea. (2008) Analisis Kinerja Bank Sebelum dan Sesudah Program Rekapitalisasi (periode 1994-2004). Semarang: Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia. (2011) *Outlook Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012*. Diakses pada 30 Maret 2012 dari Bank Indonesia Web: [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BA0429EA-EF4E-4ADB-B32AE6A83B1C4505/25052/outlook\\_perbankan\\_syariah\\_2012.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BA0429EA-EF4E-4ADB-B32AE6A83B1C4505/25052/outlook_perbankan_syariah_2012.pdf).
- Eriwardi. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Institusi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, 1, 35-42.
- Harahap, Sofyan S, dkk. (2005) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE – Usakti.
- Hasan. (2011) "Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 (1), 1-15
- I.A. (2011) "Peta Bisnis Perbankan Syariah". *Sharing*, 5(9), 10.
- Karim, Adiwarmar. (2003) *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: *The International Institute For Islamic Thought* (IIT).
- Karim. (2008) *Saat Tepat Pemisahan Bank Syariah*. Diakses pada diunduh 13 Desember 2012 dari Media Indonesia Web: <http://shariaekonomi.blogspot>.
- Kasmir. (2008) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moin, Abdul. (2004) *Merger, Akuisisi, & Divestasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Panduan Aplikasi & Solusi. (2010) *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan SPSS 17*. Yogyakarta: CV. Andi Offset dan Semarang: Wahana Komputer.
- Payamta dan Mas'ud Machfoedz. (1999) "Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di BEJ". *Kelola*, 20 (VII).
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). (2003) Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 Tanggal 11 Juni 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang Kombinasi Bisnis.

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan.  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- Rizqullah. (2010) *BNI Syariah Resmi Menjadi Bank Umum Syariah*. Diakses pada 13 Desember 2012 dari SWA web: <http://swa.co.id>.
- Silalahi, Ulber. (2010) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siregar, Mulya. E. (2001) *Solusi Permasalahan Perbankan Nasional*. Diakses pada 30 Maret 2012 dari Republika Online Web: <http://republika.co.id>.
- .....*Bank Jabar Banten Syariah akan Buka Kantor Cabang di Jakarta*. Diakses pada 31 Januari 2013 dari Era Muslim web: <http://ib2.eramuslim.com/2010/08/04/bank-jabar-banten-syariah-akan-buka-kantor-cabang-di-jakarta/>.
- .....*BJB Syariah akan Tambah Modal 300 Miliar*. Diakses pada 31 Januari 2013 dari Antara Jawa Barat Web: <http://www.antarajawabarat.com/lihat/cetak/32622>.
- .....*Profil Muamalat*. Diakses 31 Maret 2013 dari Bank Muamalat Web: <http://www.muamalatbank.com/home/about/profile>.
- .....*Status Serikat Pekerja pada Perusahaan Spin Off*. Diakses pada 10 Januari 2013 dari Hukum Online Web: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d40f61d2cf20/status-serikat-pekerja-pada-perusahaan-spin-off>.
- Susilo, Y. Sri, dkk. (1999) *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taswan. (2003) *Akuntansi Perbankan*. Semarang: UPP AMP YKPN.
- Tadoro, Michael P. (2000) *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wibisono, Yusuf. (2009) Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus 2009, hlm. 105-115.